

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmandi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Achmad Nurcholish, 2015, *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gusdur*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2009, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo Rersada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta.
- Andrew Key dan Peter Walton, 2017, *Insolvency Law : Corporate and Personal, fourth edition*, Lexis Nexis, United Kingdom.
- Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Aria Suyudi, Ertanto Nugroho, dan Hemi Sri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan. Di Negeri Pailit, cet.2*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Bakti Siahaan, 2008, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas*, Pranata Hukum, Vol 3 No. 1
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Hardani, S.Pd., M.Si, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV Pustaka Ilmu, Yogyakarta.

- Hardjowahono, Bawu Seto, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu Edisi Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Heru Guntoro, 2007, *Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian*, Jurnal Penelitian Hukum Persada Vol II No. 23, FH Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi.
- Hikmahanto Juwana, 2004, *Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional, Prosiding Kepailitan dan Transfer aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Idik Saeful Bahri, 2017, *Risalah Mahasiswa Hukum*, Rasibook, Jakarta.
- Ignatius Andi, 2004, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Aspek Komparasi dari Kepailitan (Cross-border Bankruptcy) dan Studi Kasus*, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Jerry Hoff, 2020, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, PT Tatanusa, Jakarta.
- Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Terjemahan Kartini Muljadi, PT Tatanusa, Jakarta.
- Joni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Karen Gross, 1997, *Failure And Forgiveness : Rebalancing THE BANKRUPTCY SYSTEM*, New Haven-Connecticut: Yale University, hal 94
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- Kartini Kartono, 2000, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.

- Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Michele Maltese, 2013, *Court-To-Court Protocols In Cross-Border Bankruptcy Proceedings: Differing Approaches Between Civil Law And Common Law Legal Systems*, International Insolvency Institute, hal 5.
- M. Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004, Liberty, Jogjakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Rahayu Hartini, 2017, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang.
- Rahmat Bastian, 2004, *Aspek Komparasi dari Kepailitan (Cross-border Bankruptcy) dan Studi Kasus*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Jakarta.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto*, Grafiti, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsudin Manan Sianaga, 2000, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Jakarta.
- Syamsudin Manan Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, cet 1, Idea Publishing, Gorontalo.
- Zaeni Asyhdie, 2005, *Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin, 2013, *Interpretasi tentang makna dan kedudukan "open bare ode" Terkait Dengan Permohonan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Puslitbang MA RI.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Algemeen Bepalingen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Regelement op de Burgerlijke van Justitie (Rv).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

United States Bankruptcy Code.

3. Karya Ilmiah

a. Jurnal

Acep Rohendi, 2020, *Perdamaian dalam Kepailitan sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang antara Debitur dengan Para Kreditur*, Jurnal Selisik Vol 6 No. 2,

<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i2.2207>

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi and Putu Sekarwangi

Saraswati, 2021, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Mengenai Pkpu Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No. 1,

<https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>.

Agitha Putry Andany Hidayat dan Anita Afriana, 2021, “*Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*”, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol 3 No. 1,

<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.564>

Akbarudinoor, Edi Nur Arifin dan Havid, 2022, *PKPU Sebagai Perlindungan Debitur BUMN (Perseroan) Terhadap Kreditur Konkuren (Perusahaan Swasta)*, Jurnal Lex Specialis Vol 3, No. 1.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Anita Afriana dan Rai Mantili, 2017, *Implementasi Perdamaian (Accord) pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure Vol 2 No. 2.
<https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1301>
- Anis Nur Nadhiroh, 2019, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Hak Pekerja*, Notaire Vol. 2, No.3,
<https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16237>
- Atika Ismail and Susiana Kifli, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, *Wajah Hukum* 6, No. 2,
<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1079>.
- Basuki, R. M. P. A., Agni, N. Y., & Rismoyo, A. K. (2020). ANALISA YURIDIS KONSEP PERJANJIAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 279–306.
<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.1648>
- F. Yudhi Priyo Amboro, 2022, *Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris*, *Lex Prudentium* Vol. 1, No. 2,
<https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>
- Halin, Arivan, 2023, *Prinsip Resiproritas Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)*, *Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 14, hal 2610,
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i4.2368>
- Heri Hartanto, 2016, *Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit*, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2 No. 2,
[10.36913/jhaper.v2i2.38](https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i2.38)
- Hikmatullah dan Kartini, 2022, *Analisis Financial Distress Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebelum*

dan Pada Saat Pandemi COVID-19, *Selekta Manajemen : Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen* Vol 1 No. 5.

<https://journal.uui.ac.id/selma/article/view/26041>

Huala Adolf, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 28, No. 1.

https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=132372

I Dewa Made Adhi Utama dan Dewa Gde Rudy, 2020, *Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Harta Pailit Berada di Luar Negeri*, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus* Vol. 5, No. 2,

<https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p12>

Irham Rahman dkk, 2023, *Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1,

<http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.358>

Jay Westbrook, 2000, *Global Solution to Multinational Default*, *Michigan Law Review*.

<https://repository.law.umich.edu/mlr/vol98/iss7/5>

Lilies Anisah, 2018, *Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi*, *Varia Hukum*, Vol 30, No. 39,

<https://doi.org/10.32502/jvh.v30i39.1477>

Lia Nopiharni Puspitasari S dkk, 2021, *Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2,

<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>

Liem Tony Dwi S dan Dipo Wahjoeono, 2022, *Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap oleh Kreditor*, *Maleo Law Journal* Vol 6, Palu.

<https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2202>

LoPucki, Lynn, 1999, *Cooperation in International Bankruptcy: A Post Universalist Approach*, Cornell Law Review

<https://ssrn.com/abstract=132408>

Loura Hardjaloka, 2015, *Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingan dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara*, Yuridika : Vol. 30, No. 3.

<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1952>

Moch Najib Imanullah, Emmy Latifah dan Pramesthi Dinas Kirana Ratri, 2018, *International And Domestic Law Aspects OF Cross Border Insolvency In Order To Establishing Cross-Border Insolvency Regulation In Asean: Indonesian Perspective*, Indonesia Law Review, Vol. 8 No. 2, hal 194.

10.15742/ilrev.v8n2.265

Ni Komang Widhi, Ngakan Ketut Dunia dan A.A Gde Agung Darma Kusuma, 2013, *Prinsip Debt Forgiveness dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Kertga Wicara, Vol. 2 No. 2,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/5086>

Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, 2018, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, No. 1,

<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.

Putu Ayu Ossi Widiari dan A.A. Sri Indrawati, 2018, *Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional di Indonesia*, Lertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 10,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40726>

Rizka Rahmawati, 2019, *Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Jurnal SASI Vol. 25 No. 2.

<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.217>.

Sitanggang, D. F. D., 2021, *Implementasi Personalitas Hukum Internasional Asean Dalam Pembentukan Perjanjian Internasional*. Jurnal Yuridis, Vol.7, No.2,
<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.348>

Suprihantosa Sugiarto, 2019, *Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi*, Qawānīn Journal of Economic Syaria Law 3, No. 1,
<https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484>.

Tasuji Wirismalawati dan Anak Agung Sri Utari, 2017, *Penerapan UNCITRAL Terhadap Penyelesaian Perkara Kepailitan Lintas Batas Negara Studi Kasus Kepailitan Fairfield Sentry Limited*, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/35448>

b. Skripsi / Thesis

A. Fadilla Jamila, 2016, *Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Batas*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, hal 35

Amanda Adelina Harun, 2018, *Imunitas Aset Negara Dalam Perjanjian Antara Bumn (Badan Usaha Milik Negara) Dengan Pihak Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Arindra Maharany, 2011, *Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Dan Jepang*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok.

Dicky Moallavi Asnil, 2018, *UNCITRAL Sebagai Model Law on Cross Border Insolvency With Guide To Enactment Sebagai Model*

*Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dalam Pengaturan
Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dalam Interaksi Ekonomi ASEAN,
Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

5. Sumber Lainnya

a. Terbitan Lembaga / Organisasi

UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement

The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts,
2015

Cape Town Convention, 2001

b. Website / Internet

<https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-15-bankruptcy-basics> , diakses tanggal 23 Juni 2023 11.40 WIB.

<https://uncitral.un.org/en/about>, diakses pada 20 Juni 2023 13.51 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas--aturan-icross-border-insolvency-i>, diakses pada 20 Juni 2023 12.52 WIB.

<https://www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention/>, diakses pada tanggal 24 November pukul 21.39 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1/?page=2>, diakses tanggal 21 Juni 2023 pukul 13.29 WIB.

<https://kbbi.web.id/perdamaian> diakses tanggal 22 Juni 2023 pukul 16.24 WIB.

<https://hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc>, diakses pada 10 Juli 2023 pukul 13.39.

<https://www.rs-lawyer.id/pengertian-pkpu-dan-tahapan-prosenya/>., diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 16.49 WIB.

<https://www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention/>, diakses pada tanggal 24 November pukul 21.39 WIB.

<https://reorg.com/garuda-sukuks-due-2023/>, diakses pada tanggal 25 November pukul 09.23 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas--aturan-icross-border-insolvency-i>, 27 Juli 2013, diakses pada 20 Juni 2023 12.52.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1/?page=2>, diakses tanggal 21 Juni 2023 13.29 WIB